



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah **Rp 595.947.179.020,00** (*lima ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah*) bertambah sejumlah **Rp 73.237.769.289,24** (*tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma dua puluh empat sen*) sehingga menjadi **Rp 669.184.948.309,24** (*enam ratus enam puluh sembilan milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah koma dua puluh empat sen*) dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. PENDAPATAN</b>			
a.	Semula	Rp.	488.176.867.400,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.134.543.750,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	500.311.411.150,00
<b>2. BELANJA</b>			
a.	Semula	Rp.	595.947.179.020,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	73.237.769.289,24
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	669.184.948.309,24
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(168.873.537.159,24)
<b>3. PEMBIAYAAN</b>			
<b>a. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
1.	Semula	Rp.	113.770.311.620,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	67.882.579.280,56
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	181.652.890.900,56
<b>b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
1.	Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.779.353.741,32
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	12.779.353.741,32
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	168.873.537.159,24
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |  |   |     |                    |
|--|---|-----|--------------------|
| <b>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>         |   |     |                    |
| 1.   | Semula  | Rp. | 37.772.114.400,00  |
| 2.   | Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | 1.776.902.750,00   |
|  | Jumlah PAD setelah perubahan                                  | Rp. | 39.549.017.150,00  |
| <b>b. Dana Perimbangan</b>                     |   |     |                    |
| 1.   | Semula  | Rp. | 400.736.411.000,00 |
| 2.   | Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | 2.996.000.000,00   |
|  | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan                     | Rp. | 403.732.411.000,00 |
| <b>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> |   |     |                    |
| 1.   | Semula  | Rp. | 49.668.342.000,00  |
| 2.   | Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | 7.361.641.000,00   |
|  | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp. | 57.029.983.000,00  |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

**a. Pajak Daerah**

1. Semula	Rp.	19.566.850.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	635.500.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	20.202.350.000,00

**b. Retribusi Daerah**

1. Semula	Rp.	6.774.264.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	21.402.750,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	6.795.667.150,00

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

**d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

1. Semula	Rp.	9.431.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	120.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	9.551.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

**a. Dana Bagi Hasil**

1. Semula	Rp.	47.295.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.996.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	50.291.000.000,00

**b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

1. Semula	Rp.	319.571.051.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah DAU setelah perubahan	Rp.	319.571.051.000,00

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Semula	Rp.	33.870.360.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah DAK setelah perubahan	Rp.	33.870.360.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

**a. Hibah**

1. Semula	Rp.	6.489.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.150.000.000,00
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	8.639.500.000,00

<b>b. Dana Darurat</b>			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
<b>c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>			
1. Semula	Rp.	12.650.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	12.650.000.000,00	
<b>d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>			
1. Semula	Rp.	11.594.850.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.211.641.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	16.806.491.000,00	
<b>e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>			
1. Semula	Rp.	18.933.992.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	18.933.992.000,00	

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

<b>a. Belanja Tidak Langsung (BTL)</b>			
1. Semula	Rp.	239.136.879.960,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	22.811.083.731,24	
Jumlah BTL setelah perubahan	Rp.	261.947.963.691,24	
<b>b. Belanja Langsung (BL)</b>			
1. Semula	Rp.	356.810.299.060,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	50.426.685.558,00	
Jumlah BL setelah perubahan	Rp.	407.236.984.618,00	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

<b>a. Belanja Pegawai</b>			
1. Semula	Rp.	211.892.422.820,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	11.851.694.456,24	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	223.744.117.276,24	
<b>b. Belanja Bunga</b>			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0,00

<b>c. Belanja Subsidi</b>			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		0,00
<b>d. Belanja Hibah</b>			
1. Semula	Rp.	3.287.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.492.044.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	8.779.044.000,00	
<b>e. Belanja Bantuan Sosial</b>			
1. Semula	Rp.	3.207.475.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.418.725.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	8.626.200.000,00	
<b>f. Belanja Bagi Hasil</b>			
1. Semula	Rp.	18.131.474.340,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	48.620.275,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	18.180.094.615,00	
<b>g. Belanja Bantuan Keuangan</b>			
1. Semula	Rp.	346.950.200,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	346.950.200,00	
<b>h. Belanja Tidak Terduga</b>			
1. Semula	Rp.	2.271.557.600,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	2.271.557.600,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

<b>a. Belanja Pegawai</b>			
1. Semula	Rp.	50.952.397.446,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	645.150.050,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	51.597.547.496,00	
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>			
1. Semula	Rp.	115.114.452.070,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.257.763.984,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	133.372.216.054,00	
<b>c. Belanja Modal</b>			
1. Semula	Rp.	190.743.449.544,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	31.523.771.524,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	222.267.221.068,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

**a. Penerimaan Pembiayaan**

1. Semula	Rp.	113.770.311.620,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	67.882.579.280,56
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	181.652.890.900,56

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.779.353.741,32
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.779.353.741,32

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan:

**a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya**

1. Semula	Rp.	112.270.311.620,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	42.856.408.398,81
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	155.126.720.018,81

**b. Pencairan Dana Cadangan**

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	25.026.170.881,75
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	25.026.170.881,75

**c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

**d. Penerimaan Pinjaman Daerah**

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

**e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

**f. Penerimaan Piutang Daerah**

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan:



<b>a. Pembentukan Dana Cadangan</b>			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
<b>b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</b>			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00	
<b>c. Pemberian Pinjaman Daerah</b>			
1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	5.500.000.000,00	
<b>d. Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.779.353.741,32	
Jumlah Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya setelah perubahan	Rp.	2.779.353.741,32	

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati Belitung Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

## Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 8 Oktober 2012

**WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ZARKANI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**

